

Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik

Agus Rohmat Hidayat¹, Nur Alifah²,

Agis Ahmad Rodiansjah³, Muhamad Zaenal Asikin⁴

¹Universitas Mitra Cendekia Indonesia, ²Institut Pendidikan dan Bahasa (IPB) Invada Cirebon, Indonesia, ³Universitas Negeri Semarang, Indonesia, ⁴Politeknik Siber Cerdika Internasional, Indonesia

Email: *ghousun99@gmail.com, alifahazahra43@gmail.com, agisahmad223@students.unnes.ac.id, asikinzaenal103@gmail.com

Abstrak

Sengketa Laut Cina Selatan telah muncul sebagai isu yang kompleks dan sangat diperdebatkan dengan implikasi signifikan terhadap stabilitas regional. Dari perspektif realis, perselisihan ini mencerminkan perebutan kekuasaan dan pengaruh di antara negara-negara pengklaim, yang didorong oleh keinginan mereka untuk mengamankan kepentingan strategis di kawasan. Negara-negara tetangga, yang menyadari dampak kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar, telah meresponsnya dengan meningkatkan kemampuan militer mereka dan membentuk aliansi untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Namun, menganalisis sengketa Laut Cina Selatan melalui kacamata realis memberikan wawasan berharga mengenai perebutan kekuasaan, kepentingan pribadi, dan masalah keamanan yang mendasari konflik tersebut. Melalui kajian kritis terhadap klaim teritorial, kerangka hukum, dan konteks sejarah sengketa, makalah ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai sifat multifaset sengketa tersebut. Selain itu, laporan ini mengeksplorasi implikasi geopolitik dan keterlibatan negara-negara besar di kawasan.

Kata Kunci: Sengketa Laut Cina Selatan, Respon Regional, Klaim Teritorial, Implikasi Geopolitik, ASEAN dan Aktor Eksternal, dan Realisme

Abstract

The South China Sea dispute has emerged as a complex and highly contentious issue with significant implications for regional stability. From a realist perspective, these disputes reflect power struggles and influence among claimant states, driven by their desire to secure strategic interests in the region. Neighboring countries, recognizing the impact of China's rise as a great power, have responded by boosting their military capabilities and forming alliances to counterbalance China's growing influence. However, analyzing South China Sea disputes through a realist lens provides valuable insights into power struggles, vested interests, and security issues underlying the conflict. Through a critical review of territorial claims, legal frameworks, and the historical context of disputes, this paper provides a comprehensive understanding of the multifaceted nature of such disputes. In addition, the report explores the geopolitical implications and involvement of major powers in the region.

How to cite:	Agus Rohmat Hidayat, Nur Alifah, Agis Ahmad Rodiansjah, Muhamad Zaenal Asikin (2024) Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik, (5) 2
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Keywords: *South China Sea Disputes, Regional Response, Territorial Claims, Geopolitical Implications, ASEAN and External Actors, and Realism*

Pendahuluan

Laut Cina Selatan telah menjadi topik sengketa selama beberapa dekade, dengan beberapa negara mengklaim kedaulatan atas berbagai pulau dan wilayah maritim di wilayah tersebut (Vadhya, 2023). Tiongkok, yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, telah menjadi pusat konflik ini, dan tindakan mereka di wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara lain dan organisasi internasional.

Di sisi lain, Xu, B. (2014), mengamati bahwa negara Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Filipina - mengklaim sebagian atau seluruh Laut Cina Selatan. Demikian pula halnya dengan Malaysia dan Brunei, sembilan garis putus-putus bahkan menjangkau ladang-ladang minyak dan gas yang masih beroperasi, sehingga menunjukkan bahwa suatu hari Tiongkok mungkin mempertimbangkan untuk menyita ladang-ladang tersebut untuk digunakan (Fajrina, Roziqin, & Sihidi, 2020).

Sengketa Laut Cina Selatan dianggap sebagai isu kritis dalam politik dunia saat ini karena potensinya mengganggu stabilitas kawasan dan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik selama beberapa dekade (Junef, 2018). Selain itu, Amer, R. (2014), telah menganalisis bahwa krisis Laut Cina Selatan tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap perdagangan internasional, keamanan, dan tatanan berbasis aturan (Utami, 2022). Selain itu, hal ini telah menarik perhatian negara-negara di luar kawasan, seperti Amerika Serikat, yang telah menyatakan komitmennya untuk menjaga kebebasan navigasi dan juga memastikan penyelesaian sengketa secara damai.

Inti perselisihan ini terletak pada melimpahnya sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan, termasuk minyak, gas alam, dan kekayaan perikanan (Tandungan, 2020);(Ardila, 2020). Kendali dan eksploitasi sumber daya ini telah meningkatkan ketegangan di antara negara-negara pengklaim, yang menyebabkan serangkaian kebuntuan diplomatik dan sesekali sikap militer (Pedrason, 2021). Ketegangan Tiongkok di kawasan ini, menurut Yanti (2016), khususnya melalui klaim “sembilan garis putus-putus”, telah menarik perhatian dan kekhawatiran yang signifikan.

Negara ini telah membangun pulau-pulau buatan, membentengi pulau-pulau tersebut dengan infrastruktur militer, dan memperluas kehadirannya, menantang klaim teritorial negara-negara tetangga dan menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan navigasi di wilayah tersebut (Hutama, 2019). Dalam hubungan ini Mirza (2020), telah menganalisis bahwa penumpukan kekuatan militer di Laut Cina Selatan tidak serta merta menunjukkan bahwa Beijing akan menggunakan kekuatan untuk menduduki lebih banyak pulau, melainkan bahwa Beijing berupaya meningkatkan kehadiran militernya untuk menambah kekuatannya. daya tawar dalam negosiasi di masa depan juga.

Penelitian ini bermaksud untuk fokus pada sengketa wilayah yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan, yang telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dan ketidakstabilan geopolitik di wilayah tersebut. Selain itu, bertujuan untuk

mengeksplorasi pentingnya Laut Cina Selatan dan legitimasi klaim yang dibuat oleh berbagai negara. Meskipun sebagian pihak berpendapat bahwa sebagian besar klaim negara lain di Laut Cina Selatan adalah sah, sebagian pihak lain menyatakan bahwa tindakan Tiongkok melanggar hukum internasional dan juga melanggar hak-hak negara tetangga.

Hasil dan Pembahasan

Sengketa Laut Cina Selatan

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa teritorial dan maritim yang kompleks yang melibatkan klaim teritorial yang tumpang tindih oleh beberapa negara, antara lain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Meski mendapat klaim dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, Tiongkok secara historis menganggap seluruh wilayah di Laut Cina Selatan juga berada di bawah kendalinya. Perselisihan ini menurut Sudira (2014), terus menjadi sumber ketegangan dan potensi konflik antara Tiongkok dan negara-negara lain di kawasan juga.

Ketegangan atas perairan di kawasan ini telah berfluktuasi sejak periode Perang Dingin, dengan contoh konflik yang terkait dengan berbagai faktor, termasuk melonjaknya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi militer di Tiongkok, meningkatkan persaingan dalam hal sumber daya maritim, status Tiongkok sebagai kekuatan yang sedang meningkat, meningkatnya persaingan kekuatan besar dengan AS, dan konsolidasi kekuatan di bawah Presiden Tiongkok saat ini Xi Jinping (Arifianto, 2018).

Dalam hal ini, meningkatnya ketegasan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah meningkatkan ketegangan mengenai persaingan klaim teritorial dan hak maritim. Selain itu, aspek penting lainnya dari sengketa wilayah di Laut Cina Selatan adalah mengenai pembangunan yang dilakukan Tiongkok di wilayah tersebut, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, konflik kedaulatan teritorial muncul dari persaingan klaim mengenai pulau, bebatuan, dan terumbu karang di Laut Cina Selatan.

Laksmi (2022), telah menyelidiki bahwa konflik-konflik ini melibatkan perselisihan mengenai negara pesisir mana yang mempunyai otoritas sah atas perairan dan dasar laut, serta perselisihan mengenai distribusi hak yang tepat antara negara pantai dan komunitas internasional mengenai aktivitas militer di wilayah tersebut. laut. Demikian pula, Tiongkok telah terlibat dalam kegiatan reklamasi lahan skala besar di tujuh terumbu karang seperti Fiery Cross Reef, Johnson South Reef, Cuarteron Reef, Gaven Reef, Hughes Reef, Mischief Reef, dan Subi Reef di wilayah sengketa Kepulauan Spratly di Tiongkok Selatan. Laut dan proyek-proyek ini telah menciptakan tujuh daratan buatan baru yang menyebabkan ketegangan juga meningkat dengan cepat.

Dalam hubungan ini, Nurdiansyah (2018), mengamati bahwa Tiongkok telah memulai modernisasi substansial terhadap kekuatan paramiliter maritimnya serta kemampuan angkatan lautnya untuk menegakkan klaim kedaulatan dan yurisdiksinya dengan kekerasan jika diperlukan. Pulau-pulau tersebut sebagian besar tidak berpenghuni dan tidak pernah memiliki penduduk asli, sehingga masalah kedaulatan historis menjadi sulit untuk diselesaikan.

Namun, untuk memahami alasan di balik sengketa Laut Cina Selatan, kita perlu mengetahui pentingnya wilayah ini. Oleh karena itu, sepanjang paragraf berikut, kami berusaha menjunjung tinggi pentingnya hal tersebut.

Pentingnya Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan sangat penting karena signifikansi strategis, ekonomi, dan geopolitiknya (Hidayat & Hardiyanto, 2022). Berbagai penelitian menganalisis bahwa dengan sumber daya yang melimpah, jalur pelayaran yang penting, dan sengketa wilayah, kawasan ini telah menjadi sarang perselisihan dan menarik perhatian global. Ambarwati (2023), mengamati bahwa kawasan ini adalah rumah bagi kekayaan sumber daya alam, perikanan, jalur perdagangan, dan pangkalan militer, yang semuanya dipertaruhkan dalam semakin seringnya konflik diplomatik. Memahami berbagai alasan di balik pentingnya hal ini memerlukan analisis yang komprehensif.

Pertama, Laut Cina Selatan berfungsi sebagai jalur perdagangan maritim yang penting, memfasilitasi transportasi barang bernilai triliunan dolar setiap tahunnya. Kemacetan strategis yang terjadi di Selat Malaka menjadi sumber kekhawatiran karena banyaknya volume barang komersial yang melewatinya.

Terdapat beberapa jalur pelayaran terpenting di dunia dan Cordesman, A., Burke, A., & Molot, M. (2019) berpendapat bahwa barang yang transit melalui Laut Cina Selatan senilai \$5,3 triliun setiap tahunnya, dengan \$1,2 triliun bahwa total penghitungan perdagangan dengan AS pada tahun 2019 sebesar \$5,3 triliun telah digunakan secara teratur sejak akhir tahun 2010, meskipun terjadi perubahan signifikan dalam perdagangan dunia selama lebih dari lima tahun terakhir.

Sekitar sepertiga perdagangan maritim dunia melewati perairan ini, menghubungkan Asia Timur dengan seluruh dunia. Gangguan atau hambatan apa pun terhadap aliran ini akan berdampak besar pada perdagangan global, sehingga menimbulkan efek riak pada rantai pasokan dan perekonomian di seluruh dunia. Oleh karena itu, menjaga jalur laut yang terbuka dan aman di Laut Cina Selatan sangat penting bagi stabilitas perdagangan internasional.

Rute Laut Cina Selatan, yang dikenal dengan lalu lintasnya yang tinggi, menampung lebih dari 60 persen aktivitas armada dagang tahunan global yang melewati Laut Cina Selatan, melampaui volume lalu lintas Terusan Suez sebanyak tiga kali lipat dan Terusan Panama sebanyak lima belas kali lipat. Selain itu, Macaraig, CE, & Fenton, AJ (2021), telah menganalisis bahwa hampir sepertiga pelayaran dunia—dengan perkiraan nilai perdagangan sebesar \$11,3 miliar—setiap tahun melewati Laut Cina Selatan.

Kedua, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, dan perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, Leigh Hartman (2019) berpendapat bahwa Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan ekonomi dan lingkungan yang paling penting di dunia, terdapat lebih dari separuh kapal penangkap ikan dunia berada di Laut Cina Selatan dan jutaan orang berada di Laut Cina Selatan. bergantung pada perairan ini untuk makanan dan mata pencaharian mereka.

Mengenai hal ini, Cruz-Trinidad dkk. (2009), telah meneliti bahwa di kota-kota pesisir Filipina, sekitar 30–60 % rumah tangga bergantung pada perikanan untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi, Laut Cina Selatan ini banyak menangkap ikan dan juga merupakan sumber utama protein hewani bagi wilayah Asia Tenggara yang padat penduduknya.

Zhong, H., & White, M. (2017), telah meneliti bahwa Laut Cina Selatan mempunyai arti penting sebagai hotspot penangkapan ikan global, menyumbang sekitar 12% dari total tangkapan ikan dunia pada tahun 2012. Hasil tangkapan ini, bernilai hampir \$22 miliar di pasar terbuka, menyoroti signifikansi ekonomi kawasan ini. Selain itu, perikanan di Laut Cina Selatan mempekerjakan lebih dari 3,7 juta orang dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar setiap tahunnya.

Diperkirakan wilayah ini memiliki cadangan sumber daya energi yang sangat besar sehingga menjadikannya wilayah yang menarik untuk eksplorasi dan ekstraksi. Cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah besar telah ditemukan di bawah dasar Laut Cina Selatan. Pada tahun 2012, Metelitsa, A., & Kupfer, J. (2014), telah menyelidiki bahwa Laut Cina Selatan mengandung sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 kaki kubik gas alam yang dinilai sebagai cadangan. Selain itu, Survei Geologi AS pada tahun 2012 memperkirakan bahwa mungkin terdapat 160 triliun kaki kubik gas alam dan 12 miliar barel minyak yang belum ditemukan di Laut Cina Selatan.

Selain itu, Laut Cina Selatan juga mempunyai implikasi geopolitik yang signifikan. Pentingnya Laut Cina Selatan tidak dapat disangkal dan mempunyai banyak segi. Lokasinya yang strategis, perannya dalam perdagangan global, sumber daya alam yang berlimpah, dan implikasi geopolitiknya menjadikannya wilayah yang penting bagi berbagai negara.

Pengendalian dan stabilitas Laut Cina Selatan mempunyai konsekuensi ekonomi dan keamanan yang signifikan, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung namun juga bagi komunitas internasional secara keseluruhan. Upaya mengatasi permasalahan kompleks seputar Laut Cina Selatan harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai, dan pelestarian navigasi yang bebas dan terbuka untuk menjamin stabilitas regional dan kemakmuran global.

Ketegangan Meningkat di Laut Cina Selatan

Kini pertanyaannya mengapa ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat? Sebab persoalannya bukan hanya terkait kebangkitan Taliban di Afghanistan dan respons negara-negara Laut China Selatan terhadap hal itu. Sebaliknya, konteksnya sudah lama menjadi lebih sensitif dan menjadi semakin tidak stabil.

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut, setiap negara berdaulat dapat mengklaim zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantainya, dan hingga 12 mil laut sebagai wilayah perairan. Oleh karena itu, dalam zona ini mereka mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, melakukan kegiatan kelautan dan perikanan, serta membangun pulau-pulau buatan.

Namun, Gao, Z., & Jia, BB (2013) telah meneliti bahwa berdasarkan klaim Sembilan Garis Putus Tiongkok, mereka menegaskan yurisdiksi mereka atas sekitar

2.000 kilometer wilayah maritim dari daratan utama mereka. Wilayah ini mencakup beberapa kepulauan seperti Kepulauan Spratly, Scarborough Shoal, dan Kepulauan Paracel. Pembentukan pulau-pulau tersebut diasumsikan dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya perselisihan dan ketegangan tidak hanya bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik namun juga bagi negara-negara lain yang terlibat dalam permasalahan ini.

Secara geografis, Laut Cina Selatan mempunyai kepentingan strategis yang signifikan bagi Tiongkok. Selain itu, letak Laut juga menjadikannya strategis secara militer; juga berharga bagi keamanan nasional. Daerah ini kaya akan sumber daya mineral, minyak, dan gas alam. Wilayah ini juga menjadi saksi tingginya volume lalu lintas pelayaran dengan nilai perdagangan senilai \$5,3 triliun yang melintasi perairannya setiap tahun. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari seluruh perdagangan maritim global.

Di sisi lain, persoalan sumber daya migas di Laut Cina Selatan menjadi salah satu faktor utama pemicu sengketa di Laut Cina Selatan. Jika kita mengakui bahwa kedaulatan dan demarkasi pulau-pulau, dangkalan, dan atol di Kepulauan Nansha dan tempat lain merupakan inti dari perselisihan yang terjadi di Laut Cina Selatan, maka kita dapat mengakui bahwa masalah sumber daya minyak dan gas di Laut Cina Selatan adalah isu yang paling penting. pusat konflik yang strategis bagi pihak-pihak terkait.

Poin penting lainnya dari jalur maritim ini tidak terbatas pada perspektif global atau regional; ini sangat penting bagi Tiongkok. Perdagangan maritim Tiongkok sangat bergantung pada jalur ini. Bahkan 55-60% perdagangan India bergantung pada jalur laut ini. Oleh karena itu, negara-negara di Laut Cina Selatan, termasuk Tiongkok, berusaha keras untuk mempertahankan kendali dan otoritas atas wilayah tersebut.

Banyak negara juga menjaga kepentingan mereka terkait hubungan maritim ini. Mirip dengan India, Amerika, Perancis, dan Inggris tidak ingin melihat Tiongkok mengambil kendali penuh atas wilayah ini karena hal itu akan membebankan biaya tambahan pada negara lain untuk navigasi komersial dan memerlukan izin Tiongkok. Di wilayah sengketa Laut Cina Selatan, ketegangan dan keresahan kian meningkat. Pada tahun 1988, South Johnson Reef menjadi pusat konflik Tiongkok-Vietnam.

Dalam perang ini, Vietnam mengalami kekalahan dan Tiongkok menduduki beberapa pulau. Meskipun telah terjadi ketegangan di kawasan ini selama beberapa dekade, ketegangan tersebut semakin terasa belakangan ini. McCoy, AW (2016), telah menyelidiki bahwa Tiongkok telah melakukan upaya untuk menegaskan dominasinya di kawasan ini melalui pendirian pangkalan militer, kapal perang bersenjata nuklir, dan pembangunan pulau buatan di berbagai pulau di Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang menentang Tiongkok, dengan sekutunya khususnya Filipina dan Taiwan. Selanjutnya, Washington telah lama berupaya melawan pengaruh Tiongkok di kawasan. Selain itu, jalur maritim ini juga penting untuk perdagangan AS. Oleh karena itu, Pentagon fokus pada Samudera Pasifik dan membentuk Komando Indo-Pasifik untuk menghadapi pengaruh regional Tiongkok.

Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India telah membentuk 'Quad' yang tidak hanya melakukan latihan militer tetapi juga melawan dominasi dan kekuasaan Beijing di

Laut Cina Selatan. Akibatnya, ketegangan dan keresahan di Laut Cina Selatan semakin meningkat akibat munculnya berbagai kekuatan dan kepentingannya. Terutama dengan kemenangan Taliban di Afghanistan yang menguntungkan Tiongkok dan merugikan Amerika, dinamika dan keberpihakan kekuasaan kini bergeser ke arah Laut Cina Selatan. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan internasional dan regional, yang seringkali diwujudkan dalam bentuk kerusuhan.

Secara keseluruhan, perselisihan ini mempunyai implikasi terhadap perimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan regional. Keterlibatan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, dalam masalah Laut Cina Selatan semakin memperkuat kepentingan geopolitiknya. Ketika negara-negara bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kendali di kawasan ini, Laut Cina Selatan telah menjadi titik fokus manuver geopolitik, yang mempunyai potensi implikasi terhadap tatanan global.

Tanggapan regional untuk menyelesaikan perselisihan

Berbagai negara telah mengadopsi pendekatan dan tanggapan yang berbeda-beda terhadap sengketa Laut Cina Selatan. Beberapa negara, seperti Vietnam dan Filipina, telah menempuh jalur hukum dan diplomatik untuk menegaskan klaim mereka dan menantang ketegasan Tiongkok. Upaya-upaya ini termasuk mengajukan kasus ke pengadilan internasional, terlibat dalam dialog regional, dan mencari dukungan dari negara lain dan organisasi internasional.

Aktor regional lainnya, seperti Malaysia dan Brunei, telah mengambil sikap yang lebih hati-hati dan diplomatis, berupaya menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dan menghindari konfrontasi. Negara-negara ini telah menekankan pentingnya negosiasi damai, kerja sama regional, dan kepatuhan terhadap hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan.

Tiongkok, sebagai pihak pengklaim terbesar dan paling tegas di Laut Cina Selatan, telah melakukan pendekatan yang lebih tegas dan ekspansif. Tiongkok telah terlibat dalam reklamasi lahan secara luas, pembangunan infrastruktur militer, dan patroli di wilayah yang disengketakan, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara pengklaim lainnya dan menuai kritik internasional. Meskipun krisis ini terus berkembang, terdapat beberapa tanggapan utama regional.

Negosiasi Diplomatik

Perundingan diplomatik merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan Krisis Laut Cina Selatan. Negara-negara yang terlibat, seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan lainnya, telah terlibat dalam pembicaraan bilateral dan dialog multilateral untuk mencari solusi damai. Misalnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog melalui berbagai mekanisme, termasuk Pertemuan Pejabat Senior ASEAN-Tiongkok dan Forum Regional ASEAN.

Selain itu, posisi diplomatik Kamboja juga penting terkait keputusan PCA terkait sengketa Laut Cina Selatan. Yoshimatsu, H. (2017) telah menyelidiki bahwa setelah pengumuman keputusan PCA pada 12 Juli 2016, Tiongkok berdiri dalam posisi defensif

melalui Kamboja dan menjadi pendukung utama Beijing. Selain itu, sebelum pengumuman keputusan pengadilan tersebut, (China Daily, 2016a), Hun Sen menyatakan dalam pidatonya pada peringatan 65 tahun berdirinya Partai Rakyat Kamboja (CPP) bahwa 'CPP tidak mendukung, dan terlebih lagi menentang, segala kemungkinan yang mungkin terjadi.

Deklarasi ASEAN untuk mendukung keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase, dan meminta negara-negara di luar kawasan untuk menghentikan campur tangan mereka dalam masalah Laut Cina Selatan. Terpenting, Cronin, PM, & et . Al. (2012) telah meneliti bahwa keterlibatan diplomatik dan ekonomi dengan Tiongkok dan negara lain akan berjalan lebih baik bila didukung oleh postur militer yang kredibel untuk menyelesaikan krisis Tiongkok Selatan. Di sisi lain, Simon, SW (2012), mengamati bahwa Filipina, Vietnam, dan Indonesia sangat tertarik menggunakan diplomasi regional yang berasal dari ASEAN untuk memasukkan Tiongkok ke dalam konsensus maritim regional.

Selain itu, Thayer, C. (PP-25-30, 2010), telah menyelidiki bahwa meskipun kerja sama telah meningkat dalam masalah keamanan non-tradisional seperti bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, dan pemberantasan pembajakan, konsensus mengenai Laut Cina Selatan telah tercapai. sukar dipahami. Selain itu, Jepang sangat tertarik dengan Laut Cina Selatan dalam kaitannya dengan perdamaian dan stabilitas di Asia Timur.

Namun, Shoji, T. (2014), menemukan bahwa sejak akhir tahun 2000an, mereka telah mengambil setiap kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan multilateral untuk menekankan pentingnya menjamin kebebasan navigasi berdasarkan supremasi hukum, mendukung klaim AS dan Upaya ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan secara damai juga.

Selain itu, mengingat meningkatnya ketegangan di Laut Cina Timur, pemerintah Jepang secara bersamaan juga menangani masalah Laut Cina Selatan. Secara khusus, banyak penelitian menemukan bahwa Jepang secara aktif mempromosikan kerja sama bilateral dengan negara-negara pengklaim ASEAN, khususnya Vietnam dan Filipina, yang bermaksud untuk secara kolektif mengelola tindakan tegas Tiongkok.

Kerjasama Daerah

Kerja sama regional telah diupayakan untuk mendorong pembangunan kepercayaan dan kerja sama di antara negara-negara yang terlibat dalam Krisis Laut Cina Selatan. ASEAN memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog, mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan, dan mengatasi tantangan keamanan regional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bateman, S. (2017), menemukan bahwa pernyataan Ketua KTT ASEAN di Vientiane pada bulan September 2016 menekankan pentingnya non-militerisasi dan pengendalian diri dalam melakukan segala aktivitas, termasuk reklamasi lahan yang dapat membahayakan. Semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Lebih lanjut, Mengenai manajemen konflik di Laut Cina Selatan, Li, JJ (2017), telah mempelajari bahwa ASEAN telah melakukan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah secara hukum dan melalui lokakarya mediasi, sehingga

meningkatkan gengsi organisasi tersebut. Paling menonjol adalah ASEAN mempertemukan semua pihak yang berselisih pada tahun 2002 untuk menyetujui Deklarasi Perilaku. Selain itu, Forum Regional ASEAN (ARF) menyediakan platform untuk diskusi mengenai masalah keamanan, termasuk Laut Cina Selatan, dengan partisipasi negara-negara anggota ASEAN dan mitra regional dan internasional lainnya.

Keterlibatan dan Mediasi Internasional

Komunitas internasional telah terlibat dalam mengatasi Krisis Laut Cina Selatan. Negara-negara di luar kawasan, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa, telah menyatakan keprihatinannya dan mendukung resolusi damai berdasarkan hukum internasional. Beberapa aktor internasional juga memainkan peran mediasi untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Bateman, S. (2017), penting bahwa negara-negara di Indo-Pasifik yang masih sejajar dengan AS di Laut Cina Selatan, Australia, India, dan Jepang, bukanlah negara yang berbatasan dengan laut. Sekali lagi, pembicaraannya adalah mengenai tatanan berbasis aturan global dan kebebasan laut untuk membenarkan posisi ini. Jepang juga aktif di Laut Cina Selatan meskipun bukan negara pengklaim, namun Jepang telah menggunakan berbagai forum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, namun hingga saat ini, kemampuannya untuk mempengaruhi kejadian di wilayah tersebut sangat minim.

Rowan, JP (2005), mengkaji bahwa Jepang telah mencoba bekerja secara multilateral melalui ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Jepang terutama bergantung pada aliansi keamanan AS-Jepang dan Tokyo telah berupaya menggunakan ARF untuk meningkatkan profilnya di wilayah tersebut. Dalam kaitan ini, Jepang telah mempromosikan Lokakarya Konflik Laut Cina Selatan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Indonesia.

Menanggapi reklamasi lahan dan militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan, Cottey, A. (2019), mengamati bahwa pada bulan Maret 2016 UE mengeluarkan pernyataan tegas yang mengkritik tindakan Beijing. Dalam hal ini, UE membuat pernyataan yang menekankan "menjaga ketertiban hukum laut dan samudera berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional" khususnya UNCLOS, mendesak "semua penggugat untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara damai, untuk memperjelas dasar klaim mereka, dan untuk mewujudkannya sesuai dengan hukum internasional" dan mendorong "keterlibatan lebih lanjut dalam langkah-langkah membangun kepercayaan yang berupaya membangun kepercayaan dan keamanan di kawasan.

Kerjasama Keamanan Lingkungan dan Maritim

Menyadari pentingnya pelestarian lingkungan dan keamanan maritim, negara-negara di kawasan ini menekankan perlunya kerja sama dalam mengatasi tantangan bersama. Upaya dari berbagai negara dan organisasi antar pemerintah telah dilakukan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, melindungi sumber daya laut, melestarikan terumbu karang, dan mengurangi degradasi lingkungan di Laut Cina Selatan.

Dalam hubungan ini, nampaknya kawasan Asia Tenggara juga menjadi tujuan penting bagi barang-barang manufaktur dan investasi Jepang. Oleh karena itu, Storey, I.

(2013) menemukan bahwa kepentingan Jepang di Asia Tenggara bergantung pada arus bebas perdagangan maritim melalui titik-titik strategis regional – seperti selat Singapura, Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar – dan Laut Cina Selatan.

Chircop, A. (2010), telah mengkaji bahwa yang berpuncak pada Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, Tiongkok dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Tenggara (ASEAN) sepakat bahwa, sambil menunggu penyelesaian sengketa LCS, mereka dapat mengeksplorasi atau melakukan kegiatan kerjasama, termasuk untuk perlindungan lingkungan laut.

Selain itu, kebijakan konstruktif tunduk pada kendala prosedural: "Modalitas, ruang lingkup, dan lokasi, sehubungan dengan kerja sama bilateral dan multilateral, harus disepakati oleh Pihak-pihak terkait sebelum implementasi sebenarnya. Terdapat enam belas negara yang berkumpul untuk bergabung dalam perundingan dan perjanjian awal diadopsi antara empat belas negara pada bulan November 2004.

Selain itu, *ibid* (2017), Mekanisme Kerja Sama di Selat Malaka dan Singapura didirikan atas inisiatif Jepang pada bulan September 2007 demikian juga. Penting untuk dicatat bahwa Krisis Laut Cina Selatan masih merupakan permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan, dan tanggapan yang diuraikan di atas bergantung pada perkembangan dan dinamika yang berkembang di antara pihak-pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, sengketa Laut Cina Selatan masih menjadi isu yang kontroversial, dengan berbagai tanggapan dan pendekatan regional yang mencerminkan dinamika dan kepentingan yang kompleks. Perselisihan ini mempunyai implikasi terhadap keamanan regional, hukum internasional, dan keseimbangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.

Hegemoni dan Realisme Tiongkok

Sengketa Laut Cina Selatan memberikan studi kasus yang menarik ketika mengkajinya melalui kacamata realisme dalam hubungan internasional. Realisme adalah perspektif teoretis yang menekankan kekuasaan, kepentingan pribadi, dan upaya mencapai keamanan nasional sebagai pendorong utama perilaku negara. Charrette, J., & Sterling-Folker, J. (2013), telah mengkaji bahwa realisme adalah seperangkat teori terkait hubungan internasional dan ilmu politik yang menekankan peran negara, kepentingan nasional, dan kekuasaan dalam politik dunia juga.

Menurut Halabi, Y. (2004), negara merupakan aktor terpenting dalam realisme karena kekuatan negara dipahami dari segi kemampuan militernya. Selain itu realisme ini merupakan perspektif teoretis dominan yang menekankan kekuasaan, kepentingan pribadi, dan upaya mencapai keamanan nasional sebagai pendorong utama perilaku negara.

Inti dari realisme adalah gagasan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, dan tindakan mereka didorong oleh kepentingan mereka sendiri. Dalam hubungan ini, Korab-Karpowicz, WJ (2010), menemukan bahwa kaum realis berpendapat bahwa negara berusaha memaksimalkan kekuasaan dan keamanan mereka di dunia yang bercirikan anarki, di mana tidak ada otoritas menyeluruh yang mengatur interaksi antar negara.

Dalam konteks Laut Cina Selatan, Kim, J. (2015), menemukan bahwa banyak negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, mempunyai klaim teritorial yang bersaing atas wilayah tersebut. Klaim-klaim ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap sumber daya alam yang berharga, kendali atas jalur laut strategis, dan masalah keamanan nasional.

Realisme menyatakan bahwa negara akan bertindak untuk melindungi kepentingannya dan meningkatkan kekuasaannya. Dalam kasus Tiongkok, tindakannya di Laut Cina Selatan sejalan dengan prinsip realis. Menurut Thayer, CA (2011), Tiongkok secara tegas mengejar klaim teritorialnya dengan melakukan aktivitas seperti membangun pulau buatan, membangun fasilitas militer, dan meningkatkan kehadirannya di perairan yang disengketakan.

Mengenai hubungan kekuasaan-keamanan, Raditio, KH (2015), menyelidiki bahwa realisme meyakini bahwa maksimalisasi kekuasaan diperlukan untuk menikmati keamanan. Semakin banyak kekuasaan yang dikumpulkan suatu negara, semakin aman negara tersebut. Mearsheimer, JJ (2017), berpendapat bahwa alasannya sederhana: kekuatan militer yang lebih besar akan memberikan keamanan yang lebih besar bagi suatu negara; dan jika suatu negara memenangkan perlombaan senjata, negara tersebut akan menjadi hegemon dalam sistem tersebut, yang pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup negara tersebut.

Tindakan Tiongkok dapat dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun dominasi dan mengamankan kepentingan strategisnya di kawasan. Li, M. (2010) telah meneliti bahwa seiring dengan berkembangnya kemampuan ekonomi dan militer Tiongkok, Tiongkok berupaya untuk menegaskan pengaruhnya dan menantang status quo regional. Menurut Goldstein, A. (2007), kaum realis berpendapat bahwa kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global telah mendorong Tiongkok untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas, termasuk di Laut Cina Selatan.

Jervis R. (1978), mendefinisikan dilema keamanan sebagai situasi di mana “cara suatu negara mencoba meningkatkan keamanannya menurunkan keamanan negara lain”. Namun, *ibid* (2010) Tindakan Tiongkok pasti akan menimbulkan kekhawatiran baru di beberapa ibu kota negara-negara Asia Tenggara dan mengundang tindakan balasan dari negara-negara regional tersebut, mungkin dengan dukungan implisit atau eksplisit dari kekuatan eksternal juga.

Realisme juga menyoroti dinamika kekuasaan yang terjadi di kawasan. Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang besar telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga dan kekuatan regional lainnya. Menurut Nobel, JW (1995), diktum Morgenthau bahwa politik internasional adalah “perebutan kekuasaan” dan kekuasaan adalah tujuan langsung dari kebijakan muncul saat ini sebagai cerminan kondisi awal Perang Dingin dan tentu saja bukan hukum universal. Namun, resep realisme klasik tidak memadai untuk negara-negara menengah atau kecil saat ini dan tampak ketinggalan jaman di era saling ketergantungan saat ini. Waltz, KN (P-126, 2010), telah mengembangkan gagasan bahwa realisme meremehkan gagasan kekuasaan dan menganggap bahwa "dalam anarki, keamanan adalah tujuan

tertinggi. Selain itu, para realis berbeda berpendapat bahwa negara-negara ini, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, telah menanggapi ketegangan Tiongkok dengan meningkatkan kehadiran militer mereka dan memperdalam aliansi keamanan di kawasan. Persaingan kekuatan ini semakin berkontribusi terhadap ketegangan dan kompleksitas seputar sengketa Laut Cina Selatan.

Secara keseluruhan, realisme menawarkan wawasan berharga ketika mengkaji sengketa Laut Cina Selatan. Dengan berfokus pada kekuasaan, kepentingan pribadi, dan upaya mencapai keamanan, realisme membantu kita memahami motivasi dan tindakan negara-negara yang terlibat dalam perselisihan tersebut, khususnya Tiongkok dan menyoroti sifat kompetitif hubungan internasional di kawasan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Sengketa Laut Cina Selatan merupakan isu kompleks dan kontroversial dengan dampak signifikan terhadap stabilitas regional. Esai ini mengkaji perselisihan tersebut dan respons aktor-aktor regional terhadap meningkatnya ketegangan berdasarkan realisme. Persaingan klaim teritorial, kekayaan sumber daya alam, dan kepentingan strategis telah meningkatkan persaingan di antara negara-negara pengklaim, terutama dengan tindakan tegas Tiongkok seperti pembangunan pulau buatan.

ASEAN dan aktor eksternal seperti AS, Jepang, dan Australia berperan dalam mengelola ketegangan melalui dialog, operasi kebebasan navigasi, dan memperdalam kemitraan keamanan. Meski demikian, kurangnya penyelesaian hukum yang komprehensif dan pertumbuhan kekuatan Tiongkok masih menjadi tantangan besar. Solusi yang tahan lama memerlukan dialog berkelanjutan, kepercayaan, dan komitmen terhadap tatanan berbasis aturan dan penghormatan terhadap hukum internasional.

BIBLIOGRAFI

- Ambarwati, Auliah, Putra, Adi Prahmana, Aryadi, Ahmad Wadil, Nabila, Nabila, Ramli, Nurriskeyanti, Najwa, Arzety, & Sutriani, Sutriani. (2023). Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 240–246.
- Ardila, Ririn. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 358–377.
- Arifianto, Adityo. (2018). Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)*.
- Fajrina, Amaliana Nur, Roziqin, Ali, & Sihidi, Iradhad Taqwa. (2020). Studi Geopolitik Laut China Selatan: Data Dan Analisis Media Sosial (Geopolitical Studies Of The South China Sea: Data And Analysis Of Social Media). *SAMBUTAN REDAKSI*, 43, 35.
- Hidayat, Agus Rohmat, & Hardiyanto, Feri. (2022). Lembaga Keuangan dan Kebijakan Publik Dalam Menangani Krisis Ekonomi Global. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 17710–17719.

- Hutama, Muhammad Danang Prawira. (2019). Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS). *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(02), 329–346.
- Junef, Muhar. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219–240.
- Laksmi, Luh Gde Citra Sundari, Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliantini, Ni Putu Rai. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225–242.
- Mirza, Siti Mashawa Nanda, Ismail, Khodijah, & Nantika, Adita Dwi. (2020). *Penyelesaian Masalah Perairan Indonesia Dengan Laut Cina Selatan Dengan Cara Negosiasi*.
- Nurdiansyah, Dickry Rizanny. (2018). *Strategi dan Pertahanan Maritim Nusantara: Maritim Nusantara*. diandra press.
- Pedrason, Rer Pol Rodon. (2021). *Buku Ajar Keamanan Nasional*. Jakad Media Publishing.
- Sudira, I. Nyoman. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2).
- Tandungan, Edmondus Sadesto. (2020). Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektifhukum Internasional. *Paulus Law Journal*, 1(2), 88–98.
- Utami, Saskia Tasnim. (2022). Keamanan Regional Asia Tenggara Dan Implementasi Terhadap Ketahanan Wilayah Indonesia Pasca Perjanjian AUKUS. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 199–222.
- Vadhya, Ginna. (2023). *Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Dinamika Konflik Laut China Selatan*. Universitas Komputer Indonesia.
- Yanti, Melda Erna. (2016). *Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Cina Menurut United Convention On The Law Of The Sea 1982 (Unclos Iii)*. UAJY.

Copyright holder:

Agus Rohmat Hidayat, Nur Alifah, Agis Ahmad Rodiansjah, Muhamad Zaenal Asikin
(2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

